

▪ **Zuly Qodir**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama

A B S T R A C T

Youth, Intolerance, and Radicalism are serious problems facing Indonesia and other countries including in the Middle East. This phenomenon has sprung up over the last five years with various events that have surfaced. There are many reasons for the emergence of radicalism among young people and intolerance. However, there are several alternatives also to reduce the movement of intolerance and radicalism of youth. Religious movements that come from mass organizations such as Muhammadiyah and NU can be expected to reduce it. The most phenomenal phenomenon is the emergence of ISIS Islamic state of Iraq and Syria with various violent activities in Iraq and Syria affecting religious life in Indonesia. The movement of intolerance and radicalism arises because of the lazy tolerance. The essay below wants to reflect on the continuous occurrence of terrorist acts of terrorism radicalism in our country. The following essays are based largely on literature reviews written on the basis of reports or by others, as well as observations from the authors.

Keywords: *youth, intolerance, radicalism, ISIS*

I. Pendahuluan

“Kekerasan dan kebencian dengan mengatasnamakan Tuhan adalah suatu tindakan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan” (*Paus Fransiskus, Kompas, 27/11/2015*) Pernyataan Paus diatas disampaikan ketika berkunjung ke Benua Afrika untuk membantu

mencari penyelesaian konflik antara Muslim-Kristen di benua tersebut. Paus Fransiskus sangat berharap pada kaum muda untuk melanjutkan hidup bangsanya. Ditangan kaum muda inilah sebuah bangsa akan maju dan berkembang, sekalipun para elitnya bergelimang kekuasaan dan harta kekayaan.

Kita tentu tidak ingin negara ini bergelimang darah karena pertumpahan warga sesama anak bangsa bahkan saudara setanah air. Kita tidak ingin yang terjadi di Timur Tengah, Afrika maupun di beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Turki, dan Irlandia melanda Indonesia. Cukuplah kekerasan yang mengatasnamakan kesucian Tuhan buat mereka. Kita telah dibuat ngeri melihatnya. Kita tak sanggup melihat kekejaman yang dipraktekkan atas nama Tuhan.

Timur Tengah dan beberapa negara Eropa bergolak. Indonesia tidak boleh terjadi seperti itu. Salah satu kuncinya adalah sesama umat beragama menghindari sikap arogan, menindas, menelakung serta ingin menang sendiri sehingga orang lain dianggap kafir, sesat serta harus pula dimusnahkan. Bukankah Tuhan telah memberikan pilihan pada kita, akan kafir atau beriman. Beriman atau kafir akan mendapatkan tempatnya sendiri. Kita juga bukan panitia masuk surga atau neraka. Itu hak Tuhan belaka. Kenapa kita sering melihat adanya orang meributkan dengan keras ketika seseorang atau kelompok tidak berbuat seperti dikehendaki oleh pihak lain yang berbeda, sehingga otoritas Tuhan seakan-akan berpindah tangan pada kelompok tersebut.

Terjadinya kekerasan antara agama di Indonesia, dan di tempat lain tidak pernah berhenti pada analisis dan tindakan untuk mencegahnya lebih luas. Tetapi sebelum jauh membahas soal kekerasan atas nama agama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan memandu dalam tulisan ini nantinya sehingga posisi tulisan

ini jelas adanya. Beberapa pertanyaan penting yang saya ajukan di sini adalah:

Mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror-kekerasan atas nama agama atau sebagai teroris? Apakah alasan-alasan yang menjustifikasi aksi terorisme di Indonesia? Siapakah mereka para pelaku teror di muka bumi itu? Berdasarkan pertanyaan sederhana ini, jawaban sederhana yang dapat diajukan disini adalah mereka itu dapat perorangan, kelompok maupun organisasi bahkan lembaga (individual atau negara). Dimanakah mereka melakukan aksi teror, sebagai target sasaran teroris. Serta pertanyaan sampai kapankah aksi-aksi terorisme akan berlangsung dilakukan di sebuah wilayah, menjadi pertanyaan penting yang hendak diuraikan dalam karangan ini.

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, ada beberapa asumsi yang dapat menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Dalam konteks artikel ini, para ahli memberikan penjelasan terdapat beberapa asumsi yang memungkinkan terjadinya kekerasan atas nama agama yang dilakukan utamanya oleh kaum muda. Beberapa asumsi tersebut antara lain adalah sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Dengan perspektif sosial politik, ekonomi, dan psikologi dalam melihat adanya kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme di Indonesia ternyata hal tersebut dari segi aktor atau kelompok pelaku adalah ada beberapa kelompok agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Yahudi) yang bersedia melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap pihak lain dan sekaligus sebagian membenarkan perilaku kekerasan tersebut. Para aktor pelaku kekerasan datang

dari pelbagai kelompok yang memiliki alasan masing-masing. Terdapat alasan teologis sampai alasan sosial dan juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argumen yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan radikalisme-terorisme terdapat banyak penyebab. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Hal itu menjadi dasar legitimasi yang sering muncul dipermukaan ketika seseorang mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam namun ujungnya satu saja yakni kekerasan atas nama agama.

Sekarang kita periksa siapakah pelaku radikalisme-terorisme. Setelah diselidiki ternyata para perilaku radikalisme-terorisme itu karena ada sesuatu yang “dibela” dibelakangnya, apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat adalah adanya perbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang lain. Mereka para pelaku tindakan radikal-teroris menggunakan istilah “political representative” sehingga membenarkan apa yang dilakukan bahwa pihak lain tidak merasa diwakili merupakan persoalan lain yang jauh dipikirkan oleh para pelaku kekerasan atas nama agama dan atas nama masyarakat. Mereka adalah yang merasa mendapatkan mandat untuk “membela yang

terpinggir” utamanya dari kelompok agama mayoritas disebuah negara. Kadang-kadang bukan dari agama mayoritas tetapi minoritas karena merasa diperlakukan secara diskriminatif.

Selain alasan yang sifatnya “profane” diatas. Ada alasan dasar keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama yang membenarkan perilaku radikalisme-teroris dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam proses kekerasan agama yang terjadi di muka bumi. Pendasaran atas teks suci keagamaan merupakan pendasaran yang cukup meyakinkan yang dilakukan oleh para pelaku radikalisme-terorisme keagamaan. Benar bahwa terdapat multi tafsir atas teks keagamaan namun yang dipergunakan oleh para pelaku terosisme dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan atas orang lain sebagai bentuk membela agama bahkan membela Tuhan atas nama teks suci.

Mark Juergenmeyer, ahli soal gerakan revivalisme keagamaan menuliskan bahwa ada kerancuan yang mendasar terkait doktrin keagamaan yang dipahami sebagai basis legitimasi untuk berbuat kekerasan atas Negara yang dianggap sekular. (Meyer, 2003). Hal yang sama juga dikemukakan oleh R. Scott Appleby ketika menyatakan bahwa ada ambivalensi dalam doktrin suci keagamaan dengan kekerasan yang dilakukan. (Appleby, 2003).

Mendasarkan pada beberapa asumsi diatas, maka menjadi jelas bahwa dalam perbuatan kekerasan atas nama agama terdapat beberapa penyebab yang mendasarinya. Sangat banyak kelompok

menafsirkan penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama. Sebagian lagi membenarkan kekerasan atas nama agama yang sampai saat ini terus berlangsung di Indonesia dan di negara-negara lain.

A. Penyebab Radikalisme-Terrorisme

Jika kita perhatikan terjadinya kekerasan atas nama agama, para ahli dalam hal sosiologi agama, politik maupun ilmu sosial lainnya memberikan penjelasan sekurang-kurangnya terdapat beberapa penyebab mengapa orang bersedia melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, sekalipun sebagian ahli agama melarangnya. Beberapa penyebab seperti yang akan saya kemukakan disini adalah penyebab yang sudah lazim dipahami oleh masyarakat dan para akademisi atau intelektual, tetapi tidak mengapa untuk mengulang penjelasan para ahli tersebut saya akan kemukakan dengan ringkas.

Pertama, persoalan pemahaman keagamaan. Oleh sebab karena adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. (Falahuddin, 2016). Pemahaman keagamaan merupakan bagian penting dari kekerasan agama (radikalisme-terorisme) yang dilakukan. *Kedua*, radikalisme-terorisme juga dikaitkan dengan adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam sebuah negara. Sebuah rezim politik dan partai tertentu dianggap berlaku tidak adil kepada sekelompok masyarakat.

Ketiga, radikalisme-terorisme juga buruknya dalam hal penegakan hukum sehingga menimbulkan apa yang sering

disebut sebagai ketidakadilan hukum. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimum, sehingga menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara. Ketidakadilan hukum dianggap sebagai salah satu faktor yang masih dominan dalam sebuah negara termasuk di Indonesia, sehingga aparat penegak hukum sering menjadi sasaran kekerasan kaum radikal-teroris. Peristiwa penembakan aparat kepolisian di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Poso, Mataram, Solo, Mataram dan Jakarta adalah bukti-bukti yang menjelaskan kalau posisi dianggap tidak adil dalam menegakkan hukum.

Keempat, persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan dari agama, termasuk pendidikan yang lebih menekankan aspek indoktrinasi, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah. Oleh sebab itu, pendidikan semacam itu merupakan masalah lain lagi yang sangat mungkin mendorong terjadinya radikalisme karena keebalan perspektif pendidikan agama. Oleh sebab itu harus dipikirkan kembali pendidikan agama yang bersifat transformatif dan pembebasan pada umat manusia. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan persoalan jihad dalam makna kekerasan atau perang tetapi jihad dalam makna yang luas seperti memberantas kemiskinan, memberantas mafia hukum, memberantas politik uang dan partai yang buruk adalah jihad yang sesungguhnya harus dilakukan.

Terkait dengan masalah pendidikan, fakta lapangan memberikan penjelasannya

misalnya seperti dikemukakan oleh survei Wahid Foundation tahun 2017 melaporkan mereka mendapatkan penjelasan tentang jihad sebagai kekerasan dan perang. Juga tentang qital (pembunuhan) merupakan penyebab lain yang diterima oleh pelajar sekolah menengah atas mencapai 85 % mendapatkan materi tentang *jihad* dan *qital* dalam pengajian sekolah. (Wahid Foundation, 2017) adanya represi terhadap politik Islam, justru transmisi Islam Timur Tengah terus mengalami perkembangan yang signifikan dengan cara memanfaatkan ruang publik baik melalui sektor formal mau pun informal, seperti: masjid –baik masjid kampus, kampung, mau pun di wilayah perkotaan, pondok pesantren, hingga institusi pendidikan- (Hefner, 2000; Abuza, 2007; Fealy dan Bubalo, 2007).

Kekerasan atas Nama Agama demikian banyak terjadi semasa tahun 2009-2013 tidak kurang dari 56 kasus, seperti dilaporkan oleh Setara Institute dan Centre for Religion and Cultural Studies (CRCS), UGM dalam laporannya. Perhatikan data kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia, sebagai sebuah Negara yang tidak berdasarkan agama tetapi nilai-nilai agama tetap menjadi bagian dari praktek politik kenegaraan. Data dibawah ini akan memberikan *kengerian* tersendiri pada setiap umat beragama yang memiliki nurani dan kemanusiaan, sebab agama sangat melarang adanya tindak kekerasan termasuk memberangus dan merusak tempat-tempat ibadah apalagi membunuh nyawa manusia tanpa sebuah peristiwa

peperangan yang alasannya jelas-jelas pengusiran atas nama agama.

B. Kaum Muda sebagai Penentu

Sebagai penggerak masa depan, kaum muda menjadi sangat penting. Kaum muda merupakan masa depan sebuah bangsa yang ingin maju. Kaum muda tidak bisa dituduh sebagai kelompok yang mengacaukan, tetapi mereka adalah kelompok masyarakat yang bergerak dan terus mencari. Mereka kaum muda tidak bisa ditempatkan sebagai entitas yang selalu dalam “kesesatan pikir” dan kesesatan tindakan atas nama agama/Tuhan. Tidaklah adil dan proporsional jika menjadikan pemuda (kaum muda) sebagai tertuduh.

Kaum muda memang secara umur masih belum kalah dibandingkan dengan kaum tua. Mereka masih berumur 15-35 tahun sebagaimana dikatakan oleh UNESCO. Tetapi umur yang kalah dengan kaum tua (sepuh) yang sudah berada diatas 35 tahun bukanlah hal yang bisa dijadikan alasan kaum muda harus dipersalahkan. Bahkan ditangan merekalah Indonesia masa depan akan berada. Oleh sebab kaum muda masih mengenyam pendidikan ditingkat Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi maka tidak bisa sembarang mengajarkan materi pelajaran ataupun materi kuliah yang tidak sesuai dengan realitas sosial.

Pendidikan kita harus mengajarkan realitas sehingga anak bangsa akan paham tentang realitas bukan hidup di dunia abstrak dan maya semata. Pendidikan harus mengajarkan realitas keragaman, pengakuan sosial atas keragaman-

kemajemukan, serta mengajarkan misi damai membangun bangsa dan manusia bermartabat dalam dimensi yang luas. Sekali lagi kaum muda tidak hanya sebagai objek tetapi mereka adalah subjek yang memiliki dunianya sendiri. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian sebagaimana dunianya.

Kita akan melihat beberapa fakta lapangan tentang keterlibatan kaum muda dalam aksi-aksi intoleransi yang terus menggunung dan mengepung. Kaum muda sangat penting kehadirannya di ruang publik yang penuh dengan persoalan di depan hidungnya.

Kaum muda dengan begitu perlu dilibatkan dalam proses perubahan sosial yang kian keras. Kaum muda perlu mendapatkan pemahaman kondisi sosial ekonomi politik dan historis yang memadai sehingga memiliki gambar yang jelas tentang sebuah fenomena sebuah negara. Kaum muda tidak bisa disesatkan begitu saja. Kaum muda juga tidak bisa diarahkan harus berbuat ini atau berbuat itu. Kaum muda itu penuh dengan kreativitas dan inisiatif karena itu berilah ruang untuk berekspresi dan berimajinasi membangun masa depannya asalkan positif dan sesuai dengan cita-cita sosialnya. Kita sekarang dapat menyaksikan bahwa kaum muda adalah generasi milenial yang sangat aktif dalam dunia maya. Bukan karena kaum muda itu bodoh atau pun kurang mampu menelaah persoalan-persoalan tetapi kaum muda itulah yang sekarang disebut sebagai generasi milenial (generasi sekarang) yang sangat intensif dengan persoalan media sosial. Berbeda dengan dunia kaum tua yang telah lahir jauh sebelum mereka.

Sebuah survei yang dilakukan oleh CSIS (2017) bahwa kaum muda adalah penikmat media sosial yang sangat tinggi (87 %) dari 5000 pelajar dan mahasiswa angkatan baru menggunakan media social dalam tiap harinya. Sementara itu, The Wahid Foundation melaporkan kaum muda sangat intensif dengan media social seperti *Instagram*, *twitter*, *fadebook*, dan *linkedin* sebanyak 77 %. Kaum muda belajar agama dari media social bukan dari ustadz-ustadzah yang berceramah secara langsung. (Wahid Foundation, 2017).⁴²⁸

Keterlibatan kaum muda di dunia maya bukanlah tiba-tiba. Tidaklah bermasalah ketika kaum muda itu aktif dalam media sosial. Menjadi bermasalah ketika media sosial demikian didominasi dengan adanya pemberitaan kebencian kepada pihak lain. Bahkan menjadi sangat berbahaya jika yang mengunggah berita kebencian adalah kaum muda dan mereka menyukainya seperti dilaporkan Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta bahwa media sosial Islam berita kebencian mencapai 87 % dan diakses oleh kaum muda. Aktivitas kaum muda di media sosial tidak bisa dihentikan sebab inilah dunia mereka yang selalu mengakses media sosial mencapai 3-4 jam/hari.

Disinilah tugas kaum elit agama diperhadapkan dengan dakwah-dakwah di media sosial untuk memberikan pemahaman keagamaan yang inklusif sehingga kaum muda mampu memiliki pandangan dan sikap toleran, menghargai perbedaan, menghormati keyakinan keagamaan yang berbeda dengan keyakinan yang dimilikinya. Akan lain

masalahnya jika kaum muda ternyata lebih memilih masalah-masalah toleransi dan solidaritas sosial, maka merekalah yang kita jadikan sebagai agen perdamaian dan solidaritas sosial. Kecenderungan ini oleh sebagian pengamat media dan populisme Islam disebabkan sedang terjadi kebangkitan politik identitas keagamaan atau populisme Islam. (Hadiz, 2014)

Dalam kaitan dakwah agama, maka elit agama, pendakwah-misionaris tidak bertugas menyiram bibit radikal serta intoleransi kepada kaum muda dengan doktrin-doktrin keagamaan yang disampaikan secara serampangan dan tidak lengkap sesuai konteks sosial historisnya. Kaum elit agama harus memberikan contoh yang nyata dalam berkata-kata (berdakwah) dengan santun, bijaksana, dan bertindak dengan damai dan menentramkan. Tidak sembarangan berkata dan bertindak.

C. Radikalisme Kaum Muda

Berdasarkan gambaran tentang kekerasan-radikalisme agama telah dikemukakan di atas, mendorong penulis untuk mendeskripsikan Fenomena Radikalisme Gerakan ISIS di Indonesia, dengan memperhatikan berita-berita di media massa (elektronik dan cetak) dimana angkatan muda banyak terlibat di dalamnya. Seperti di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa kaum muda (mahasiswa) tertarik dan terlibat dalam gerakan radikal-terorisme yang terjadi di Indonesia. Jumlah sedikit tetapi

tidak bisa dibiarkan karena mengganggu jumlah banyak kaum muda yang sering dijadikan sasaran untuk terlibat dalam gerakan radikalisme-terorisme di Indonesia.

Fenomena ISIS merupakan isu yang saat ini ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini semenjak kemunculannya diketahui oleh masyarakat Indonesia dari dukungan warga Indonesia yang melakukan aksi baiat di beberapa daerah serta video yang diunggah di youtube baik berupa dukungan maupun ancaman. Beberapa peristiwa yang terjadi terdapat kaum muda di sana terlibat seperti di Malang, Temanggung, Wonosobo, Jawa Barat, dan Banten. (Kompas, 26/6, 2016, Koran Tempo 26/6/2016). ISIS (*Islamic State of Irak and Syiria*) adalah gerakan keagamaan yang berupaya untuk menegakkan pemerintahan atau negara yang berlandaskan sistem islam (Khilafah Islamiyah) yaitu kelompok ekstremis yang mengikuti ideologi garis keras Al-Qaidah dan berpedoman kepada prinsip-prinsip jihad global (Ramdhany: 2014).

Kelompok ISIS memiliki ciri Bendera berwarna hitam, hati yang keras (arogan dan sadis). ISIS yang merupakan kelompok radikal baik itu Al-Qaeda, Taliban, Nusra, Boko Haram, dan Asyabab merupakan gerakan yang selalu menghasilkan karya sadisme dan brutalisme. ISIS yang dikenal sebagai kelompok radikal selalu menggunakan karya sadisme dan brutalisme (Sumantho, 2014: 33-35).

ISIS adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Kelompok ini awalnya adalah binaan atau ciptaann Al-

Qaeda untuk wilayah Irak, akan tetapi dengan terjadinya konflik di Suriah, ISIS pun terlibat (Sumantho, 2014:29).

Gerakan ISIS memiliki ciri yang melekat pada kelompok ini yaitu; Pertama, bendera berwarna hitam. Kedua, kelompok yang lemah, Ketiga, hati yang keras (arogan dan sadis). Keempat, mengaku mendirikan negara Daulah Islamiyah yang bertujuan mendirikan negara Islam. Kelima, mengajak kepada Al-Quran. Keenam, nama-nama merekasesemuannya julukan atau alias. Ketujuh, nama keluarga mereka adalah nama daerah. Kedelapan, memelihara janggut mereka hingga panjang (Sumantho, 2014: 33-35).

Fenomena ISIS adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu tertentu. Fenomena bisa terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia (Hanif, 2011). Munculnya Islamic State of Irak and Syiria (ISIS) adalah fenomena baru dan mengejutkan saat ini. ISIS sebuah kelompok yang melakukan operasinya di Irak dan Suriah, telah membawa pengaruh kepada negara-negara di dunia. Gerakan yang dipimpin oleh Abu Bakar al - Baghdadi ini dikenal dengan cara sadis yaitu menghalalkan segala cara seperti membunuh, membantai, menjarah, meneror siapapun dari kelompok manapun yang berbeda, menghalangi, dan menolak keberadaan kelompok ISIS.

Radikalisme-terorisme ISIS jika diperhatikan dalam berita media kita dapat menyaksikan kaum muda terlibat di sana. Mereka memanggul senjata, latihan perang, bahkan tampak di sana terlibat

dalam pemboman dan perang sungguhan yakni peledakan bom, mortar, bahkan pembunuhan.

Radikalisme memiliki sejarah yang dimunculkan dengan sikap fanatik, intoleransi, dan eksklusif dalam Islam pertama yang ditampakkan oleh kaum Khawarij sejak abad pertama hijriyah (Santosa, 2012). Radikalisme sendiri memiliki ciri yang melekat yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Memperjuangkan Islam secara Kaffah, dimana syariat Islam sebagai hukuman negara. *Kedua*, mendasarkan praktek keagamaannya pada orientasi masa lalu (safety). *Ketiga*, cenderung memusuhi Barat, terutama sekularisasi dan modernisasi. *Keempat*, perlawanan terhadap liberalisme islam yang tengah berkembang di Indonesia. (Abdurrahmad Mas'ud, 2014).

Jika dilihat dari tujuan radikalisme adalah kekuasaan dan penguasaan politik Dengan mengedepankan atau men-*cover* atau memanfaatkan golongan, kelompok-kelompok primordial (suku, bangsa, ras, keyakinan, keagamaan, dan kepercayaan). Berbagai pendekatan primordial inilah gerakan radikalisme membangun kekuatan untuk mendapatkan legitimasi dan solidaritas (Dwilaksana, 2014).

D. Intoleransi Kaum Muda harus Dihindarkan

Bibit toleransi kaum muda seperti dikemukakan para psikolog sosial dan ilmuwan sosial sekurang-kurangnya disebabkan karena empat hal utama; yakni *pertama*, soal kesiapan mental yang belum matang, sehingga anak-anak muda

gampang terpengaruh oleh hal-hal yang disampaikan dari orang yang dianggap lebih tua, lebih pintar, serta lebih “berkuasa” dalam hal keagamaan. Mental kaum muda pendeknya masih mencari figur siapa yang akan dijadikan “pedoman” dalam kata-kata dan hidup.

Kedua, ketimpangan politik yang memunculkan spekulasi bahwa kaum muda kurang mendapatkan akses memadai padahal mereka menjadi tulang punggung politik seperti di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat kaum muda kecewa pada negaranya. Ketika kecewa dan mendapatkan siraman kebencian maka yang muncul adalah kebencian pada salah satu agama tertentu padahal yang berpolitik di Indonesia bukan hanya salah satu agama.

Ketiga, persoalan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering dikatakan oleh para ahli ekonomi politik dan sosiolog menjadi bibit paling subur munculnya intoleransi dan kekerasan. Disebabkan karena hidup susah yang diderita, pekerjaan sulit didapatkan dan pengangguran menunggu di depannya, ketika ada sekelompok atau seseorang menyiramkan bibit kebencian dan masuk surga segera tanpa basa-basi mereka kaum muda mengikutinya. Kasus pengantin bom dan pemboman yang dilakukan di Indonesia lima tahun terakhir adalah anak muda bukan kaum sepuh (*old citizenship*). Pemboman di Tamrin, Februari 24, 2017, misalnya dilakukan oleh mereka yang berumur masih 26-32 tahun. Menurut informasi pihak Kepolisian Sunoto dan kawannya mereka empat orang yang melakukan dimana tiga diantaranya wafat

seketika dan satu orang melarikan diri sampai sekarang tidak ditemukan. (*Kompas*, 25, 2-2017)

Keempat, masalah pemahaman teks keagamaan. Ini merupakan produk lama yang senantiasa direproduksi oleh para pemberi “mandat terror” dan para “mandat intoleransi” bahwa agama kita mengajarkan untuk jihad dengan fisik yakni mati sebagai martir atau mati di sebuah ujung pedang, mati disebuah granat atau bom Molotov. Semuanya dianggap sebagai jihad yang sesungguhnya maka tak segan anak-anak muda yang masih kurang paham agamanya segera melaksanakan.

Hal itulah yang perlu mendapatkan perhatian oleh para pengelola negara dan pendakwah agama. Para pengelola negara dan pendakwah agama perlu merevisi kembali pemahamannya tentang doktrin jihad, doktrin iman, doktrin, takwa bahkan doktrin surga dan neraka sehingga memberikan kerangka yang relatif utuh pada kaum muda harapan bangsa kita. Agamawan harus mendorong sikap dan tindakan toleransi antar umat beragama yang sekarang tampak semakin hampa.

Sikap toleransi itu sendiri merupakan kesediaan untuk menerima adanya perbedaan teologi, perbedaan keyakinan, menghargai, menghormati yang berbeda sebagai sesuatu yang nyata adanya dan diyakini oleh mereka yang memang berbeda dengan kita. Dengan sikap toleransi inilah akan lahir sikap hidup rukun dalam perbedaan, tidak saling menghujat, membenci, mengkafirkan apalagi hendak membunuhnya karena berbeda dengan kita.

Itulah pesan yang sangat penting dari pemimpin sedunia umat Katolik seperti kita sampaikan diawal tulisan bukan hanya bagi umat Katolik, tetapi bagi seluruh warga manusia yang mengaku beragama. Beragama dengan demikian bukan untuk saling membenci, menghardik, atau menghakimi. Beragama adalah memanusiaikan manusia serta menghargainya sebagai Ciptaan itulah Kodrat Ilahi.

Imparsial mencatat, terjadi 24 kasus penutupan gereja sepanjang 2005. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya, selama 2005 sebanyak 12 kasus. Bentuknya, mulai dari penyesatan, penangkapan, hingga pelarangan beribadah. Selanjutnya, Setara Institute (2007), mencatat bahwa di sepanjang 2007 telah terjadi 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004—2007, terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja.

Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan beragama yang dirilis *The Wahid Institute* (2009), mencatat bahwa sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleransi. Laporan ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan yang dinilai diskriminatif. Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan

al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, juga menekan surat bernomor 177 Tahun 2009, tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Pada tahun 2010, *The Wahid Institute* kembali merilis laporannya. Hasilnya menyedihkan. Kasus Pelanggaran naik; dari 35 kasus, menjadi 63 kasus pelanggaran. Sedang intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 persen. Salah satu faktornya, menurut analisis *The Wahid Institute* adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.

Hal senada, juga terlihat dalam laporan yang dirilis *Setara Institute* (2010). Sepanjang tahun 2010, terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Dari 286, 103 tindakan, dilakukan oleh negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian; sebanyak dengan 56 tindakan. Selanjutnya Bupati/Walikota, Camat, Satpol PP, Pengadilan, Kementerian Agama, TNI, Menteri Agama, dan selebihnya, institusi-institusi lainnya.

Selain itu, riset yang juga dilakukan oleh *Setara Institute*, pada rentang 20 Oktober-10 November 2010, terhadap 1.200 responden, juga menunjukkan adanya *tren* peningkatan pemahaman anti toleransi. Survei yang mengambil responden warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini

menyebut, (49,5 persen) responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan (45 persen) lainnya, dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain, dan sisanya tidak menjawab. (Setara Institute; 2010, 11).

Pada tahun 2011, ICRP mencatat bahwa ternyata aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok keagamaan tertentu, ternyata tak menurun. Aksi paling brutal menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 2011. Tiga orang tewas dengan cara biadab. Kasus ini, tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain.

Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, menyebut bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, (51,1 persen) menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, (28,2 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama. (Tempo, 2011).

Di samping itu, persoalan yang tak kalah penting adalah soal peran media dalam advokasi penguatan toleransi di media massa. Tantangan bias toleransi dalam meliputi isu-isu keagamaan relatif masih menuai soal. Hasil riset *The International Journal of Press* dan Yayasan Pantau (2010), bertajuk “Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai-Nilai Islam”, menunjukkan problem ini. (vhrmedia.com:2010).

Hal yang juga menarik survei LSI dan Yayasan DENY JA menyebutkan tahun 2012, masyarakat kehilangan kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga Negara demikian rendah. Ketidakpuasan masyarakat atas Lembaga Kepresidenan mencapai 62,7%, ketidakpuasan terhadap Polisi 64,7% dan ketidakpuasan terhadap partai politik 58,1%. Rendahnya kepuasan masyarakat atas tiga lembaga Negara disebabkan kerja lambat, terkesan apatis, dan membiarkan dalam pelbagai kasus pelanggaran HAM kebebasan beragama di Indonesia.

Sementara itu mendasarkan pada laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan *The Wahid Institute 2013* menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah 245 peristiwa. Terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280, dimana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara. (*The Wahid Institute Januari 2014*).

Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI: 2012), menunjukkan bahwa *trend* intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan keberadaan orang lain (yang berbeda identitas (berbeda agama, maupun berbeda aliran dalam satu agama) di sekitarnya. Di tahun 2005, mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan yang berbeda agama (6,9%), pada tahun 2012, naik menjadi (15%). Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan orang berbeda aliran (Syiah) (26,7%) pada tahun 2005, menjadi (41,8%) pada tahun 2012. Publik yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda identitas tersebut, mayoritas adalah mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (SMA ke bawah), yakni sekitar (67,8%) keberatan untuk bertetangga dengan yang berbeda agama dan (61,2%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas), (32,2%) tak nyaman bertetangga dengan yang berbeda agama, dan (38,8%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah.

Berdasarkan pada survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA diatas kita dapat menyaksikan bahwa masyarakat beragama di Indonesia memiliki kebencian yang cukup mendalam pada Syiah sebagai bagian dari Islam yang telah dianut sejak dahulu di Indonesia. Masyarakat kita memiliki perasaan yang tidak senang kepada Syiah sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 terus meningkat. Hal ini tentu saja menjadi persoalan serius di negeri yang beragam

secara paham keagamaan. Hal ini jika dibiarkan akan membahayakan kehidupan keagamaan di Indonesia.

Survei The Wahid Foundation (2016) melaporkan kaum muda terlibat dalam dukungan pada aktivitas kekerasan keagamaan (jihad) dan terorisme mencapai 76 %. Mendukung aksi-aksi intoleransi mencapai 46 %. Sementara tahun 2017, The Wahid Foundation melaporkan bahwa *Unit Kerohanian Islam* (Rohis) di Jabodetabek melakukan kajian jihad dalam makna perang mencapai 87 %. Terkait dengan aksi kekerasan radikalisme-terorisme yang dilakukan di Indonesia, kaum muda muslim yang tergabung dalam Unit Kerohanian Islam juga menyetujui. Makna dari temuan The Wahid Foundation adalah kaum muda muslim telah memiliki pikiran bahwa jika ada aksi kekerasan atas nama agama Islam itu dibolehkan. Fakta-fakta di atas, setidaknya menunjukkan bahwa sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan konflik, anti-dialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya. Berdasarkan atas fakta yang lapangan yang disampaikan The Wahid Institute diatas terdapat pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh setiap warga negara yang mengaku memiliki keyakinan keagamaan. Hal apakah yang menyebabkan perilaku kekerasan dan tindakan melanggar undang-undang dasar terkait kebebasan beragama terus berlangsung? Bukankah kebebasan menganut keyakinan keagamaan merupakan

hak asasi yang tidak dapat tergantikan di Indonesia?

Hal yang paling krusial jika kita mendasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan *The Wahid Institute* perilaku pelanggaran dan tindakan kekerasan atas mereka yang beragama dilakukan oleh aktor yang bernama Negara, bukan sekedar warga negara. Padahal kita mengetahui bahwa Negara seharusnya berperan menjadi penjamin dan pengayom kebebasan berkeyakinan di dalam menganut suatu keyakinan keagamaan dan mengerjakan ibadah penganut agama sesuai keyakinannya.

Jika kita baca secara keseluruhan dari data survei yang terkait dengan persoalan intoleransi, radikalisme, dan terorisme seperti dikemukakan diatas kita dapat menyatakan bahwa persoalan intoleransi dikalangan kaum muda muslim (khususnya) cukup serius sebagai *problem* keagamaan dan kebangsaan. Bahkan, jika kita kaitkan dengan isu radikalisme dan terorisme dikalangan kaum muda diantara mereka itu berpikiran mendukung aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Oleh sebab itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kaum muda Indonesia berdasarkan survei diatas bisa dikatakan menyetujui adanya aksi-aksi radikalisme terorisme yang dilakukan atas nama agama.

E. Isu Krusial Antaragama

Indonesia, merupakan negara yang secara agama multi religious, baik internal (Islam terdapat berbagai mazhab), sedangkan secara eksternal kita mengenal enam “agama resmi”, yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan

Konghucu. Sementara agama-agama non resmi seperti agama-agama suku dan keyakinan-keyakinan lokal seperti Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Cirebon, Parmalin di Sumatra, Wetu Telu di Lombok tidak diakui sebagai agama. Bersama-sama dengan Penganut Pengasih, Sapto Dharmo, dan lainnya di Jawa dikenal dengan sebutan penganut penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa dan bagian dari kebudayaan. Padahal betapa banyaknya yang tidak masuk dalam anah “agama resmi” Negara jika berdasarkan UU PNPS tahun 1965 yang hanya mengakui enam agama resmi saja: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu, diluar enam tidak termasuk agama atau aliran yang sah di Indonesia. Di Indonesia sendiri seperti dalam PNPS (Peraturan Negara dan Pejabat Sipil) tahun 1965 mengatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Islam. (*Hikmat Budiman, 2007*)

Beberapa persoalan isu antar agama yang menjadi krusial untuk kita bicarakan dalam hubungannya dengan beberapa perilaku dan tindakan kekerasan antar agama di Indonesia yang dilakukan dan diyakini oleh kaum muda muslim. Persoalan penting seperti telah dikemukakan dibagian sebelumnya dari tulisan ini, juga persoalan-persoalan penting yang hendak dikemukakan dibawah ini merupakan hal sangat penting dalam kerangka Negara yang tidak berdasarkan agama. Persoalan dasar Negara yang sudah final dipersoalkan oleh kaum muda muslim. Padahal Indonesia, sebagaimana dikemukakan para ahli tentang agama dan Negara di Indonesia seperti Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Maarif

dan Nurcholish Madjid bukanlah Negara sekuler tetapi juga bukan Negara agama. Kita dapat menyaksikan beberapa isu penting yang masih dipersoalkan dalam kerangka Negara Pancasila. Bahkan kita akan dapat menyaksikan agar Pancasila diubah dengan dasar Negara lainnya yakni Islam atau khilafah islamiyah seperti gagasan Hizbut Tahrir Indonesia. Dasar negara Pancasila adalah isu yang sampai sekarang dipersoalkan sebab dikatakan oleh sebagian kelompok agama di Indonesia utama Islam, bahwa Pancasila bukan dasar Negara yang cocok untuk Indonesia, sebab Pancasila hanya hasil kompromi politik umat Islam atas umat lain. Pancasila hendak diganti dengan dasar Islam oleh sebagian kecil kelompok Islam Indonesia. Hal ini saya kira memang harus dicegah sebab sebagaimana kita ketahui Indonesia bukanlah Negara Islam atau Negara agama. Indonesia adalah Negara masyarakat beragama.

Dalam hal dasar Negara Pancasila, kaum muda Islam kita tidak lagi mendukung Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia (mencapai 56 %). Kaum muda muslim mendukung negara khilafah di Indonesia (mencapai 86 %) sebagaimana dilaporkan oleh Wahid Foundation, 2017 serta survei yang dilakukan oleh Navara Foundation 2017, kaum profesional yang di dalamnya sebagian adalah kaum muda mendukung radikalisme-terorisme mendapai 78 %. Navara Foundation juga merilis bahwa 23,4 % mahasiswa tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara tetapi setuju khilafah Islamiyah. Demikian pula dengan Pelajar kita sejumlah 23,4 % dukung khilafah Islamiyah bukan Pancasila.

Persoalan Pendirian Rumah ibadah (gereja khususnya) merupakan kasus yang terjadi di berbagai tempat harus dipikirkan oleh kekuasaan dan umat beragama. Kaum muda berlatar belakang agama Islam tidak setuju jika ada rumah ibadah yang didirikan di sekitar tempat tinggal mereka. CRCS tahun 2014, melaporkan mencapai 46 %. Terdapat kesalahan politik berhubungan dengan rumah ibadah khususnya gereja. Ketika umat Kristen hendak mendirikan gereja, sebagian umat Islam marah dan menolaknya hingga ada yang membakarnya. Hal ini salah satu penyebab umat Islam tidak mengetahui perlunya mendirikan gereja yang banyak oleh umat Kristen dan seandainya didirikan mungkin tidak perlu terlalu megah apalagi jika umat islamnya termasuk golongan ekonomi lemah. Hal ini akan membangun kecemburuan sosial antara orang Islam dan Kristen bahwa kaya dan miskin adalah hasil usaha tetapi juga akses politik serta ekonomi senantiasa mengiringi di belakangnya.

Oleh sebab itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana antar umat saling hidup berdampingan tanpa kecemburuan dan kekerasan. Mendirikan gereja sebenarnya tidak masalah asalkan disetujui dan tidak menumbuhkan persoalan baru diantara mereka. Harus ada pemahaman yang dalam tentang gereja itu apa maknanya dan mengapa banyak harus dijelaskan pada umat Islam.(CRCS UGM, 2012).

Inilah persoalan lain yang juga sering kali sangat serius. Kawin antaragama merupakan isu sangat penting yang muncul dalam sepuluh tahun terakhir bahkan selama dua puluh tahun terakhir. Kawin antara agama identik dengan pindah agama.

Padahal tidak selalu demikian. Sebab perihal kawin agama tidak harus berpindah agama. Hanya saja dikalangan muslim kawin antar agama antara Islam dengan Kristen masih dianggap hal yang dilarang kitab suci karena dianggap kawin dengan kaum yang tidak sah sehingga dilarang. Namun sekarang sebagian intelektual muslim tidak lagi memandang kawin antar agama dalam perspektif teologis tetapi sosiologis dan psikologis selain kultural. Kawin antar agama seringkali menjadi senjata ampuh untuk saling mencurigai, menyudutkan dan menyalahkan dakwah agama-agama terutama Islam dan Kristen. Kawin antar agama dianggap sebagai metode penambahan jumlah umat beragama dikalangan agama Ibrahim, sebagai agama misionaris-atau agama dakwah. Kaum muda muslim, tidak setuju dengan kawin antar agama jika dilakukan dilingkungan keluarganya, mencapai 78 %. Tetapi jika dilakukan oleh keluarga orang lain kaum muda ini setuju mencapai 43 %. (CRCS UGM, 2011)

Inilah persoalan lain lagi yang hemat juga saya sangat serius yakni soal isu pindah agama (konversi agama). Khususnya dalam tradisi Islam, soal pindah agama dianggap sebagai kafir dan murtad (tidak lagi beriman) sehingga akan banyak argumen diajukan disana untuk menentang pindah agama dan menghentikan orang untuk pindah agama. Pemilihan agama dalam islam sekalipun dipersilahkan oleh kitab suci tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Pindah agama dilarang keras tetapi kalau dari awal pada agama yang bukan Islam tidak dipersoalkan. Inilah yang menurut saya menjadi *problem* agama-agama misi yang

kadang mencari pengikut dengan dakwah atau penyebaran di masyarakat yang beragama. Tidak mungkin umat Islam hanya berdakwah dikalangan umat Islam dan sebaliknya Kristen, mereka sama-sama agama misionaris maka menyebarkan kepada masyarakat adalah hal yang sebenarnya wajar. (CRCS UGM, 2010, 2011, 2012).

Isu tentang toleransi seringkali dikaitkan secara langsung dengan isu pluralisme. Toleransi yang berlebihan jika ada istilah toleransi berlebihan (sebab saya sering mendengar istilah ini dikalangan sebagian umat Islam tentu saja) adalah istilah yang sangat krusial diantara umat islam sebab senantiasa dihubungkan dengan isu yang sekarang menjadi penting dalam sebuah masyarakat modern yang multi agama dan etnis. Pluralisme inilah isu sangat sentral belakangan apalagi Majelis Ulama Indonesia memahami Pluralisme adalah relativisme alias meniadakan keragaman dan keunikan agama-agama. Bahkan dalam pandangan MUI agama-agama itu dianggap sama oleh para pejuang pluralisme padahal tidak demikian sama sekali. Pluralisme bahkan sebuah gagasan dan praktek penghargaan yang hebat tentang keragaman agama yang ada di muka bumi. Pluralisme sebenarnya menurut hemat saya adalah prinsip agamaku adalah agamaku dan agama mu adalah agama mu. Tidak ada campur aduk disana secara pasti sebab masing-masing agama memang memiliki keunikan dan perbedaannya. (CRCS UGM, 2009, 2010, 2011, 2012). Semua tindakan kebencian, teror dan perusakan harus mendapatkan perhatian serius dari aparat negara yang dinilai oleh publik lemah bahkan sebagai *failed state*,

sehingga publik tidak mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan selama ini. Semoga Tahun 2014 ini dan lima tahun mendatang menjadi tahun yang lebih baik untuk kehidupan keagamaan di Indonesia. Kita tahu umat Islam adalah mayoritas mencapai 88,18 % dari total penduduk Indonesia 237.641.326 (BPS, 2010). Secara berurutan penganut Kristen: 16,5 juta (6,96%); 6,9 juta (2,4 %) Katolik; 4 juta (1,69%) Hindu; 1,7 juta (0,72%) Budha; 0,11 juta (0,05%) Konghucu dan lainnya 0,13 %. Sekarang diperkirakan mencapai 254 juta, dengan etnis Jawa paling dominan 207 juta, tetapi tidak berarti umat lain tidak penting artinya di Indonesia, sebab makna keragaman (multi agama dan multi etnis) inilah yang membuat Indonesia itu kaya dan seharusnya hebat.

Berdasarkan data survei dari beberapa lembaga penelitian yang dikemukakan diatas dimana kaum muda muslim Indonesia masih mempersoalkan beberapa masalah seperti dasar Negara, hubungan dengan orang beragama lain, kawin antar agama, toleransi dan pluralisme sebenarnya ada masalah dalam kerangka pemikiran kaum muda untuk menerima kenyataan sejarah bahwa Indonesia telah disepakati oleh pendiri bangsa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang digali dari dalam dirinya sendiri masyarakat nusantara bukan dari Negara lain sebagai kesepakatan bersama untuk menjadi dasar Negara. Pancasila juga diyakini oleh para pendiri bangsa serta para ahli agama dan Negara tidak bertentangan dengan Islam.

Selain itu, kaum muda kita ternyata masih bermasalah dalam hal yang bersifat rekognisi sosial serta meletakkan kesetaraan

semua warga Negara di Indonesia untuk hidup berdampingan berdasarkan realitas keragaman agama dan aliran keyakinan. Kaum muda masih menolak hal itu yang secara faktual menumbuhkan kekerasan dan sektarianisme yang membelenggu masyarakat. Agama harus dihadirkan untuk membela rakyat yang melarat dan terdiskriminasi bukan membela para raja dan penguasa.

Dalam konteks agama seperti itu, janganlah dilupakan bagaimana pentingnya kaum muda menjadi bagian dari agensi perjuangan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di Indonesia. Kaum muda tidak bisa dibiarkan untuk terlibat dalam aksi-aksi kekerasan sebab mereka inilah yang akan menjadi penentu kehidupan Indonesia dimasa depan. Kaum muda merupakan harapan kehidupan bangsa. Kaum muda tidak bisa dipersalahkan jika terlibat dalam aksi-aksi kekerasan radikalisme dan terorisme ketika persoalan bangsa terus berada di hadapannya yang dianggap tidak sesuai dengan harapan kaum muda. Fakta sosial bahwa terdapat jurang kesejahteraan sosial di Indonesia yang sering menjadi pemicu adanya aksi kekerasan dilihat oleh kaum muda. Belum lagi masalah pengangguran terdidik juga menjadi persoalan serius di Indonesia.

Oleh sebab itu beberapa persoalan penyebab radikalisme-terorisme harus menjadi perhatian kita semua. Beberapa penyebab radikalisme terorisme kaum muda seperti persoalan ekonomi, politik, mentalitas, agama dan kultural merupakan hal yang perlu diperhatikan secara serius. Kaum muda adalah bagian dari entitas

masyarakat yang sangat penting diharapkan melakukan perubahan dimasa depan. Fakta sosial belakangan terdapat banyak kaum muda terlibat dalam aksi-aksi kekerasan di beberapa daerah nusantara adalah hal yang tidak bisa dianggap *remeh*. Jangan pernah dibiarkan kaum muda terlibat dalam aksi-aksi kekerasan radikalisme dan terorisme berdasarkan argumen keagamaan sekalipun sebab hal itu tidak sesuai dengan ajaran keagamaan yang *rahmahmatan lil alamin*.

Referensi

- Al-Qurthuby, Sumantho. 2014. *Radikalisme Agama dan ISIS*. Jurnal NU-Online Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2010.
- Dwilaksana. 2014. *Radikalisme dan Karakteristiknya*. Jurnal Studi Agama Universitas Islam Negeri Malang, vol 12 nomor 2 2014.
- Hadiz, Vedi R. 2014. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Iseas Singapore*.
- Hikmat Budiman. 2007 *Masyarakat Multikultur: Kebebasan dan Kewarganegaraan*, Tifa Foundation dan Yayasan Interseksi.
- Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP 2011), *Aksi Kekerasan dan Diskriminasi di Indonesia*.
- JE. Sahetapi (dkk). 1999. *Laporan kekerasan perusakan rumah Ibadah di Indonesia*. FFKS. Surabaya.
- Kompas. 25 Februari 2017.
- Kompas. 26 Juni 2016.
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, *Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia*.
- Masud, Abdurrahman. 2014. *Islam dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar.
- Media Indonesia. 7 Juli 2012.
- Meyer, Mark Juergen, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence (Comparative Studies in Religion and Society)* September 1, 2003.
- Mohammad Hanif. 2011. *ISIS dan Kekerasan Keagamaan di Timur Tengah*, *Jurnal kajian Islam dan Keindonesiaan*. IAIN Salatiga, vol 9 No. 2 2011.
- R. Scott Appleby. 2004. *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*.
- Setara Institute. 2011. *Kehidupan keagamaan di Indonesia*. Tempo. 26 Juni 2016.
- The Wahid Institute. 2012 *Laporan Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. The International Journal of Press dan Yayasan Pantau, 2010.
- The Wahid Institute. 2014. *Kekerasan Bernuansa Keagamaan di Indonesia*.
- Thomas Santosa. 2012. *Radikalisme dan Kekerasan Agama, Galia Indonesia*, Jakarta.
- Yayasan Denny JA dan LSI Community. 2012. *Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia*.
- Zainal Abidin Bagir, Suhadi dan Endy Saputro. 2009. *Laporan Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Centre for Religious and Cultural Studies UGM.